



Tantangan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor

Aditia Saputri¹, Almisar Hamid²

Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Alamat: Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan Banten

E-mail : aditiasaputri27@gmail.com¹

Abstract: *The Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) is assistance provided by the government to Beneficiary Families (KPM) in the form of non-cash every month. Initially, the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program was a replacement program for the Prosperous Rice Program (Rastra) which had several problems. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 63 of 2017. This BPNT uses an electronic account mechanism, so it can only be used to buy food from traders or e-warongs that have collaborated with Himbara banks, but now BPNT assistance has changed to being in the form of money that is withdrawn at Bank link. This study aims to identify and analyze the obstacles faced in the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Barengkok Village, Leuwiliang District, Bogor Regency. This study uses a qualitative approach with in-depth interview and observation methods. Data were collected from various sources, including beneficiaries, program implementers, and other related parties. The analysis was carried out to identify and group the main obstacles that affect the implementation of BPNT. The study identified several major obstacles in the implementation of BPNT, which were grouped into three categories: (1) Technical obstacles, including problems with infrastructure such as internet networks and EDC machines; (2) Administrative obstacles, including inaccuracies in data verification and lack of socialization about BPNT mechanisms; and (3) Socio-Economic obstacles, such as difficult access to e-warongs and low financial literacy among beneficiaries. These obstacles indicate that the implementation of BPNT in Barengkok Village faces various challenges that affect the effectiveness of the program. To improve the results and impact of BPNT, improvements need to be made in technical, administrative, and socio-economic aspects. Recommendations include improving infrastructure, improving administrative coordination, and improving education for the community.*

Keywords: *Constraints, Implementation, Non-Cash Food Assistance (BPNT)*

Abstrak: Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk non-tunai setiap bulannya. Pada awalnya, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera (Rastra) yang memiliki beberapa kendala permasalahan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017. BPNT ini menggunakan mekanisme akun elektronik, sehingga hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang atau e-warong yang telah bekerja sama dengan bank Himbara tetapi kini bantuan BPNT sudah berubah menjadi berupa uang yang di ambil di Bank link. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan observasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk penerima manfaat, pelaksana program, dan pihak terkait lainnya. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan kendala-kendala utama yang mempengaruhi pelaksanaan BPNT. Penelitian mengidentifikasi beberapa kendala utama dalam pelaksanaan BPNT, yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori: (1) Kendala Teknis, termasuk masalah dengan infrastruktur seperti jaringan internet dan mesin EDC; (2) Kendala Administrasi, meliputi ketidakakuratan dalam verifikasi data dan kurangnya sosialisasi tentang mekanisme BPNT; dan (3) Kendala Sosial-Ekonomi, seperti akses yang sulit ke e-warong dan rendahnya literasi keuangan di kalangan penerima manfaat. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa pelaksanaan BPNT di Kelurahan Barengkok menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas program. Untuk meningkatkan hasil dan dampak dari BPNT, perlu dilakukan perbaikan dalam aspek teknis, administrasi, dan sosial-ekonomi. Rekomendasi termasuk peningkatan infrastruktur, perbaikan koordinasi administrasi, dan peningkatan edukasi bagi masyarakat.

Kata kunci: Tantangan, Pelaksanaan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. PENDAHULUAN

Kelurahan Barengkok, sebuah wilayah di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, menjadi salah satu lokasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan menyediakan bantuan pangan yang dapat diakses melalui kartu elektronik di e-warong. Namun, perjalanan pelaksanaannya tidaklah mudah. Pada tahap awal pelaksanaan, pemerintah menghadapi berbagai tantangan. Infrastruktur menjadi kendala utama. Sebagian besar wilayah Barengkok memiliki akses jalan yang kurang memadai dan kekurangan e-warong, sehingga penerima manfaat harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai e-warong terdekat. Kondisi ini menyulitkan terutama bagi warga lansia dan mereka yang tidak memiliki kendaraan. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme program juga menjadi masalah. Banyak penerima manfaat yang belum familiar dengan penggunaan kartu elektronik. Beberapa dari mereka bahkan mengalami kesulitan untuk memahami prosedur pembelian bahan pangan di e-warong.

Sosialisasi yang dilakukan sebelumnya dianggap kurang menjangkau masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, kendala teknis pada sistem elektronik sering kali terjadi. Gangguan jaringan atau mesin yang tidak berfungsi di e-warong menyebabkan antrian panjang dan membuat penerima manfaat harus kembali di hari lain. Kondisi ini menimbulkan rasa kesal bagi masyarakat yang sudah bersusah payah datang dan menunggu lama karna mengantri. Tidak hanya penerima manfaat, pihak pengelola e-warong juga menghadapi masalah. Modal yang terbatas sering menjadi penghalang dalam menyediakan stok pangan sesuai kebutuhan. Ditambah lagi, pengiriman bahan pangan terkadang terlambat karena kendala logistik. Meskipun berbagai tantangan muncul, pemerintah bersama masyarakat dan pengelola e-warong terus berupaya mencari solusi. Sosialisasi lanjutan dilakukan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan infrastruktur dan mempermudah akses ke e-warong apalagi sekarang program bantuannya sudah di ganti menjadi Uang bukan lagi bahan pangan jadi penerima kurang pemahaman terkait bantuan yang disalurkan dan setiap antuan itu muncul masyarakat tidak ada informasi karena bantuan tersebut langsung masuk ke ATM atau kartu bantuan yang sudah di sediakan oleh pemerintah terkadang ada pihak penerima manfaat yang menunggu bantuan cair karena sebagian masyarakat penerima bantuan mengandalkan bantuan BPNT karena tidak ada pendapatan lain, dan ada sebagian juga yang setiap bulannya mengecek ke Mesun ATM atau Bank Link terdekat untuk mengetahui bahwa Bantuan tersebut sudah ada apa belum terkadang sangat kasihan kalau bantuan ini belum cair ke kartu penerima manfaat.

Perjalanan pelaksanaan BPNT di Kelurahan Barengkok adalah cerminan bahwa program yang baik memerlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan kerja sama semua pihak, harapan akan terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat prasejahtera di wilayah ini tetap terjaga. Masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang dihadapi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor Kelurahan Barengkok. Kemiskinan menggambarkan situasi di mana individu atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik dari segi fisik maupun ekonomi. Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. Kelurahan Barengkok terletak di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang didominasi oleh perbukitan dengan sebagian besar warganya bergantung pada sektor agraris seperti pertanian dan perkebunan. Berikut adalah beberapa aspek penting yang menggambarkan kondisi Kelurahan Barengkok.

1. Kondisi Geografis dan Infrastruktur

Kelurahan Barengkok memiliki akses jalan yang sebagian masih berupa jalan tanah atau berbatu, terutama di daerah pedalaman. Kondisi ini menyulitkan mobilitas warga, terutama saat musim hujan, karena jalan menjadi licin, banjir dan sulit dilalui. Sarana transportasi umum sudah banyak, Tetapi sehingga warga biasanya mengandalkan kendaraan pribadi untuk beraktivitas maka dari itu pendapatan berkurang bagi supir angkot.

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Sebagian besar penduduk di Kelurahan Barengkok bekerja sebagai petani, buruh tani, atau pekerja informal. Pendapatan masyarakat rata-rata masih rendah, sehingga banyak keluarga tergolong dalam kategori prasejahtera. Tingkat pendidikan masyarakat bervariasi, tetapi akses terhadap pendidikan formal sudah mulai membaik.

3. Akses terhadap Fasilitas Publik

Fasilitas publik di Kelurahan Barengkok, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pusat perbelanjaan, sudah banyak. Tetapi lapangan pekerjaan yang susah. Di sisi lain, kehadiran program bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), memberikan dampak positif bagi masyarakat prasejahtera.

4. Kondisi Kehidupan Sosial

Masyarakat Kelurahan Barengkok dikenal memiliki budaya gotong royong yang kuat. Tradisi ini sering terlihat dalam berbagai kegiatan seperti kerja bakti, acara keagamaan, dan kegiatan sosial lainnya. Namun, beberapa warga masih menghadapi tantangan dalam

mengakses informasi dan program-program pemerintah akibat terbatasnya jaringan komunikasi dan teknologi.

5. Tantangan yang Dihadapi

a. Keterbatasan Infrastruktur

Kondisi jalan yang kurang memadai menjadi penghalang utama dalam distribusi logistik dan akses layanan dasar.

b. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, sehingga banyak warga bergantung pada bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok.

c. Kurangnya Sosialisasi Program

Tidak semua warga memahami berbagai program bantuan atau kebijakan pemerintah akibat kurangnya edukasi dan informasi yang merata.

Meski menghadapi berbagai tantangan, Kelurahan Barengkok memiliki potensi untuk berkembang lebih baik, terutama dengan adanya dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. Keberhasilan pembangunan di wilayah ini sangat bergantung pada upaya bersama untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia pada September 2022 mencapai 9,57 persen, yang setara dengan 26,36 juta penduduk miskin. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,03 persen atau 200.000 orang dibandingkan dengan Maret 2022, di mana jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 26,16 juta orang. Namun, jika dibandingkan dengan September 2021, terjadi penurunan sebesar 0,14 persen atau sekitar 140.000 orang dari total 26,50 juta penduduk miskin pada periode tersebut. Dari laporan tersebut terlihat masih tinggi angka kemiskinan di Indonesia. Masyarakat miskin umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga sulit bersaing di pasar kerja, yang pada akhirnya menyebabkan tingginya angka pengangguran. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat dapat menjadi panduan dalam mendorong pembangunan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini dirancang untuk membantu masyarakat miskin dengan menyediakan bantuan pangan dalam bentuk non-tunai.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk non-tunai setiap bulannya. Pada awalnya, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera (Rastra) yang memiliki beberapa permasalahan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017. BPNT ini menggunakan mekanisme akun elektronik, sehingga hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang atau e-warong yang telah bekerja sama dengan bank Himbara. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi beban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap gizi yang seimbang, sehingga diharapkan penyaluran bantuan ini dapat berkontribusi pada peningkatan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan penerima manfaat.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga merupakan hasil kerja sama antara kementerian, lembaga negara, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pelaksanaan program ini, dikeluarkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang diberikan kepada KPM sebagai alat pembayaran dengan fitur uang elektronik dan tabungan, sehingga dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial (Sembako, 2020). Program BPNT ini termasuk program nasional sehingga dijalankan di seluruh wilayah Indonesia. Desa Barengkok, yang berada di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, merupakan salah satu daerah yang menjadi penerima manfaat dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Desa ini memiliki karakteristik penduduk yang mayoritas bekerja di sektor pertanian, yang menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar warganya. Sebagai desa agraris, pendapatan masyarakat desa Barengkok cenderung bergantung pada hasil pertanian, yang rentan terhadap fluktuasi harga, cuaca, dan kondisi ekonomi lainnya. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi rumah tangga miskin. Program ini diharapkan mampu menggantikan program bantuan pangan sebelumnya dengan sistem yang lebih efisien dan tepat sasaran. Melalui BPNT, penerima manfaat mendapatkan bantuan dalam bentuk saldo yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang kemudian dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong atau agen yang telah ditunjuk. Namun, pelaksanaan program BPNT di berbagai daerah seringkali menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas dan pencapaian tujuan dari program ini. Kelurahan Barengkok di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, adalah salah satu wilayah yang menjadi sasaran program ini. Kendala dalam pelaksanaan BPNT di wilayah ini penting untuk diteliti karena dapat memberikan

gambaran mengenai faktor-faktor yang menghambat program tersebut, serta memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan pelaksanaannya di masa mendatang. Penelitian ini berfokus pada identifikasi dan analisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan BPNT di Kelurahan Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Dengan memahami berbagai hambatan yang ada, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengoptimalkan pelaksanaan program BPNT sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan data berupa deskripsi, baik secara lisan maupun tertulis, mengenai orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, Menurut Meleong (2005) Penelitian deskriptif ialah fokusnya pada kata-kata bukan angka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada informan yang telah dipilih dengan cara purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012) menekankan bahwa pengetahuan terhadap teknik pengumpulan data sangat krusial, karena tanpa pengetahuan tersebut, peneliti mungkin tidak mampu mengumpulkan data sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Penelitian ini menemukan berbagai kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kendala-kendala ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu masalah teknis, masalah administrasi, dan masalah sosial-ekonomi.

1. Kendala Teknis

Salah satu kendala teknis yang signifikan adalah keterbatasan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan jaringan internet. E-warong yang ditunjuk sebagai tempat penukaran bantuan sering mengalami kesulitan dalam mengakses jaringan internet yang stabil, yang mengakibatkan proses transaksi menjadi lambat atau bahkan tertunda. Hal ini tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan bagi penerima manfaat, tetapi juga mengganggu kelancaran pelaksanaan program secara

keseluruhan. Selain itu, terdapat kendala dalam ketersediaan dan kualitas mesin EDC (Electronic Data Capture) yang digunakan untuk memproses transaksi BPNT. Beberapa e-warong melaporkan bahwa mesin EDC sering mengalami kerusakan atau tidak berfungsi dengan baik, yang mengakibatkan penerima manfaat harus menunggu lama atau kembali di lain waktu untuk melakukan pembelian.

2. Kendala Administrasi

Masalah administrasi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan BPNT di Kelurahan Barengkok. Proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat sering kali tidak akurat, yang menyebabkan adanya penerima manfaat yang tidak layak menerima bantuan atau sebaliknya, penerima manfaat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terdaftar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pihak kelurahan dengan instansi terkait, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan verifikasi data. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme dan prosedur BPNT kepada masyarakat juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak penerima manfaat yang tidak memahami cara menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mengakses bantuan, sehingga memerlukan pendampingan yang lebih intensif.

3. Kendala Sosial-Ekonomi

Kendala sosial-ekonomi yang dihadapi penerima manfaat juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan BPNT. Beberapa penerima manfaat mengalami kesulitan dalam mengakses e-warong karena jarak yang terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Kondisi geografis yang sulit, seperti akses jalan yang buruk, menambah beban bagi penerima manfaat, terutama bagi mereka yang lanjut usia atau memiliki keterbatasan fisik. Selain itu, tingkat literasi keuangan yang rendah di kalangan penerima manfaat juga menjadi hambatan dalam penggunaan bantuan non tunai. Banyak penerima manfaat yang masih terbiasa dengan bantuan tunai dan merasa kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru ini. Akibatnya, bantuan yang diberikan tidak dimanfaatkan secara optimal.

Kendala-kendala yang diidentifikasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun BPNT memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Kendala teknis, seperti infrastruktur yang tidak memadai, mengindikasikan perlunya perbaikan dalam penyediaan fasilitas yang mendukung program ini. Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan bahwa infrastruktur yang memadai tersedia, terutama

di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dari segi administrasi, diperlukan peningkatan koordinasi antara berbagai instansi yang terlibat dalam proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan tidak ada penerima manfaat yang terlewat atau tidak layak menerima bantuan.

Di sisi lain, pendekatan yang lebih inklusif dalam sosialisasi dan edukasi mengenai BPNT perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap program ini. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya bantuan non tunai dan bagaimana cara menggunakannya secara efektif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kendala sosial-ekonomi tidak bisa diabaikan. Kebijakan tambahan yang mendukung penerima manfaat, seperti peningkatan akses transportasi ke e-warong dan program literasi keuangan, dapat membantu mengatasi kendala-kendala tersebut. Dengan mengatasi kendala-kendala ini, diharapkan Program BPNT di Kelurahan Barengkok dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kendala yang mempengaruhi pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa kesimpulan utama dapat ditarik sebagai berikut:

- 1. Kendala Teknis,** Infrastruktur yang tidak memadai, terutama dalam hal jaringan internet dan mesin EDC, menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan BPNT. Keterbatasan ini mengganggu proses transaksi dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi penerima manfaat.
- 2. Kendala Administrasi,** Proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat sering kali tidak akurat, mengakibatkan beberapa penerima yang tidak layak atau tidak terdaftar. Kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme BPNT juga mempengaruhi pemahaman dan keterlibatan masyarakat.
- 3. Kendala Sosial-Ekonomi,** Akses yang sulit ke e-warong dan tingkat literasi keuangan yang rendah di kalangan penerima manfaat mempengaruhi efektivitas

penggunaan bantuan non tunai. Jarak dan kondisi geografis juga menambah beban bagi penerima manfaat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik.

Secara keseluruhan, kendala-kendala ini menunjukkan bahwa meskipun BPNT memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaannya memerlukan perbaikan dalam beberapa aspek. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan infrastruktur, koordinasi yang lebih baik dalam administrasi, dan edukasi yang lebih intensif untuk masyarakat. Selain itu, solusi untuk masalah sosial-ekonomi seperti aksesibilitas dan literasi keuangan juga perlu dipertimbangkan. Dengan mengatasi kendala-kendala ini, diharapkan Program BPNT di Kelurahan Barengkok dapat lebih optimal dalam memenuhi tujuan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., & Megawati, S. (2022). Evaluasi kebijakan program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. *Publika*, 175-190.
- Anwar, D. P., Ati, N. U., & Pindahanto, R. (2020). Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *Respon Publik*, 14(3), 1-7.
- Badan Pusat Statistik. (2022, November). Perkembangan beberapa indikator utama sosial-ekonomi. Perkembangan beberapa indikator utama sosial ekonomi Indonesia November 2021. Badan Pusat Statistik. <https://bps.go.id>
- Fanny, N. R. F., & Megawati, S. (2022). Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. *Publika*, 407-418.
- Maryam, S., & Candra, E. A. (2022). Evaluasi program penyaluran bantuan pangan non tunai (BNPT) pada kelompok masyarakat miskin di era pandemi COVID-19 di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3).
- Rachmawati, D. (2021). Analisis efektivitas implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(1), 57-68.
- Rahayu, P., & Fitriani, H. (2023). Efektivitas program bantuan pangan non tunai dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 3(1), 146-155.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, tentang Bantuan Pangan Secara Non Tunai. Jakarta.

- Republik Indonesia. (2018). Permendagri Nomor 13 Tahun 2018, tentang pedoman pemberian bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah. Jakarta.
- Sembako, Pedoman Umum Program. (2020). Pedoman Umum Program Sembako 2020. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Sudarsono, A., & Winarsih, W. (2021). Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam pemberdayaan masyarakat: Perspektif ilmu kesejahteraan sosial. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inspiratif*, 4(2), 113-124.
- Suryani, E., & Setiawan, E. (2022). Evaluasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di masyarakat: Studi kasus di Kota Semarang. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 26(1), 97-108.
- Suyanto, B., & Haryanto, R. (2022). Peran ilmu kesejahteraan sosial dalam implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 1-14.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial, Jakarta.
- Wulandari, D., & Utami, R. (2023). Studi evaluasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam mewujudkan kesejahteraan sosial: Tinjauan dari perspektif ilmu kesejahteraan sosial. *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 45-57.
- Yudianto Yunus Eko. (2019). Implementasi program bantuan pangan non tunai di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 9(2019). ISSN 2088-7469.